

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Devi Purnama Sari¹⁾, Eka Andriani²⁾, Zulia Hanum³⁾

¹Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
email: devipurnamaa.sari@gmail.com

²Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
email: ardikaeka040@gmail.com

³Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
email: zuliahanum@umsu.ac.id

Abstract

The purpose of this research was to analyze the level of effectiveness and efficiency of the North Sumatra Provincial Government budget. The type of research conducted in this research is descriptive quantitative. This research was conducted using time series data from 2019-2021. This study uses secondary data sourced from sumutprov.go.id. The results of this study indicate that the implementation of the budget in 2019-2021 in the North Sumatra Provincial Government, seen from the analysis of budget effectiveness, is considered effective. This can be seen from the ratio of the effectiveness of the expenditure budget in 2019 of 90.13%, in 2020 of 95.14% and in 2021 it was 93.62% and the locking of the spending budget in 2019-2021 for the Provincial Government of North Sumatra was seen from the analysis of spending efficiency which was considered efficient. This can be seen from the efficiency ratio of the spending budget in 2019 of 70.74%, in 2020 of 61.43% and in 2021 of 68.94%. Therefore, the toy budget for the North Sumatra Provincial Government is included in the criteria for being effective and efficient.

Keywords: Budget, Effectiveness, Efficiency

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari sumutprov.go.id. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019-2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efektivitas anggaran belanja dinilai efektif hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitas anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar 90,13%, tahun 2020 sebesar 95,14% dan tahun 2021 sebesar 93,62% dan pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019-2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efisiensi anggaran belanja dinilai efisien hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar 70,74%, tahun 2020 sebesar 61,43% dan tahun 2021 sebesar 68,94%. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kriteria efektif dan efisien.

Kata kunci: Anggaran Belanja, Efektivitas, Efisiensi

PENDAHULUAN

Dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan terdiri dari Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Susunan pada pemerintahan mengalami pergantian dari sistem lama dengan tujuan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik untuk memiliki kekuatan dalam membuat keputusan kebijakannya.

Tuntutan lain timbul supaya organisasi pemerintahan mampu mencermati *value for money* yang menuntut pemerintahan harus bijak didalam pengadaan serta alokasi sumber daya, efisiensi didalam penggunaan sumber daya yang mana berarti pemakaian sebisa mungkin diminimalkan serta hasilnya dioptimalkan, dan efektif dalam arti agar dapat tercapai seluruh tujuan yang telah diharapkan (Yunina, 2019). Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan

value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing*), serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan program setiap unit kegiatan dibutuhkan ketersediaan anggaran yang kemudian akan disalurkan pada setiap program yang disediakan atau program yang direncanakan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Suatu otonomi daerah dapat dikatakan berhasil jika peran pemerintah tidak lepas dari pengelolaan keuangan. Dengan adanya pengelolaan keuangan, maka pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah serta dapat menunjukkan bahwa uang atau dana telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Anggaran adalah suatu susunan yang tertulis sehubungan dengan aktifitas sebuah organisasi, dimana secara kuantitatif dinyatakan sebagai periode tertentu, biasanya berbentuk satuan uang, namun bisa berupa satuan barang. Secara garis besar anggaran dapat diartikan sebagai perlengkapan manajemen untuk menggapai tujuan, sehingga diperlukan data serta informasi yang memiliki sifat terkendali maupun tidak yang digunakan sebagai bahan taksiran untuk keperluan penyusunan. Hal ini dikarenakan semua data beserta informasi yang berkaitan akan menjadi penentu keakuratan taksiran yang berkaitan dengan proses dari perencanaan anggaran (Han & Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2019).

Anggaran merupakan suatu komponen yang sangat utama untuk melaksanakan suatu program atau rencana yang telah dirancang terlebih dahulu. Upaya yang dilakukan dalam merealisasikan atau mencapai suatu program atau rencana yang telah ditetapkan, terlebih dahulu harus melakukan perencanaan yang sangat matang. Perencanaan yang matang yang mana akan dipergunakan dalam merealisasikan atau mencapai program yang telah dirancang atau ditetapkan tersebut. Menurut Roudlotul Jannah (2013), anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang dapat diukur dengan satu kesatuan yang terdiri dari estimasi pengeluaran untuk suatu periode tertentu serta segala sumber yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pengeluaran tersebut.

Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Anggaran sektor publik adalah suatu rencana keuangan pemerintah mengenai estimasi pengeluaran penerimaan yang akan ditargetkan di masa depan agar dapat terwujud berdasarkan pemeriksaan data-data yang diperoleh pada tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam proses penyusunan penganggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran adalah salah satu proses politik dikarenakan pada sektor pemerintah anggaran wajib memiliki sifat yang terbuka dan transparan agar dapat diketahui oleh masyarakat. Proses dari penganggaran sektor publik dimulai pada saat dilakukan rumusan strategi. Tahap penganggaran sektor publik termasuk bernilai karena jika anggaran tidak efisien dan tidak berorientasi pada kinerja maka dapat menyebabkan kegagalan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Salah satu aspek pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini daerah dibebaskan untuk mencari sumber pendapatannya dan membelanjakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Hal ini kemudian dituangkan dalam rencana keuangan pemerintah yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dijadikan sebagai acuan dan dasar oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanjanya. APBD memuat seluruh informasi keuangan suatu daerah yang dilihat dari sisi penerimaan dan sisi pengeluaran, akan tetapi sisi pengeluaran cenderung lebih menjadi perhatian publik karena realisasinya dianggap sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan anggaran tersebut berhubungan langsung dengan program dan kegiatan untuk melayani kepentingan masyarakat oleh karena itu pelaksanaan anggaran belanja pemerintah perlu diukur efektivitas dan efisiensinya. Pada saat melaksanakan pembangunan dan pemerataan daerah, suatu pemerintah pada tentunya akan menggunakan anggaran yang ada yaitu APBD.

APBD digunakan untuk mewujudkan dalam pembangunan tersebut. Dalam mewujudkan cita-cita pemerintah yang hendak dicapai sesuai dengan rencana yang terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah tersebut, dalam penggunaan anggaran yang dilakukan harus efektif dan efisien. Laporan

realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang mana dapat untuk mengetahui apakah dalam menggunakan anggaran tersebut dapat dikatakan efektif dan efisien ataupun sebaliknya. Dalam mengukur atau membandingkan antara keluaran (*output*) yang telah dihasilkan terhadap masukan (*input*) yang digunakan, efisiensi dan efektivitas sangat penting untuk dipergunakan. Efisiensi merupakan sebuah ukuran dari suatu keberhasilan atau tercapainya yang bisa dilakukan penilaian berdasarkan sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan kegiatan pemerintah. Efektivitas merupakan sebuah ukuran tingkatan suatu kegiatan dalam mencapai sebuah tujuannya sudah mencapai sejauh mana. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah jenis laporan yang dibuat sebelum dibuatnya neraca serta arus kas. Pada pemerintahan, anggaran menjadi pokok yang mana menjadi sebuah dasar tercapainya kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan.

Menurut Andriyani dan Setyowati (2016) didalam laporan realisasi anggaran ditemukan adanya data untuk menaksir sumber daya ekonomi dimana informasi ini digunakan sebagai keperluan dana untuk aktifitas pemerintahan pusat serta daerah dalam suatu periode dengan melakukan penyajian laporan secara komperatif. Laporan realisasi anggaran biasanya melakukan pengungkapan aktifitas keuangan pemerintahan berupa kedisiplinan terhadap APBD dengan melakukan penyajian ikhtisar sumber, alokasi, serta juga sumber daya ekonomi dimana dikoperasikan pemerintahan pusat maupun daerah pada periode tahun pelaporan tertentu. Laporan realisasi anggaran juga menunjukkan perbandingan target anggaran beserta dengan realisasinya pada suatu tahun anggaran.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo 2009).

Efisiensi menurut Mardiasmo dalam Aries S. Sumenge (2013) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efisiensi penggunaan anggaran harus mencapai target yang telah disusun sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi dapat digunakan untuk mengamati bagaimana kondisi keuangan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Organisasi sektor publik dianggap baik apabila pihak yang terlibat bisa melaksanakan seluruh tugasnya yang juga berkaitan terhadap capaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan biaya relatif rendah.

Kewajiban baru sebagai organisasi pemerintahan adalah selalu memperhatikan *value for money*, bersamaan dengan adanya tuntutan yang diterapkan masyarakat dimana harus selalu mengutamakan tanggung jawabnya terkait dilaksanakannya *value for money* yang terkait pengadaan serta alokasi sumber daya dengan artian penggunaannya dibuat seminimal mungkin namun dapat menciptakan hasil yang maksimal (Rosalina, 2012). Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengeluaran daerah, maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah disusun secara umum.

Dari uraian latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeiuaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pemerintahan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya harus melakukan perencanaan yang baik supaya tujuan perusahaan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu alat yang digunakan dalam perencanaan adalah anggaran, dimana anggaran ini berisi tentang rencana kegiatan yang dilaksanakan serta berisi tujuan yang hendak dicapai dalam satu periode tertentu.

Nordiawan dalam Majid (2019) menjelaskan anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter. Anggaran merupakan hal penting bagi suatu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran dapat diartikan sebagai perumusan dan pengelolaan rencana strategis untuk aktivitas yang akan dilakukan atau tujuan yang hendak dicapai, dalam hal sektor publik ini tujuan yang dimaksud yaitu penyediaan pelayanan publik yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Anggaran sektor publik menjadi alat bagi pemerintah dalam mengarahkan pembangunan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resource*), pilihan (*choice*), dan *trade off* juga menjadi point penting dalam anggaran sektor publik. Dalam bidang pemerintahan, anggaran menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Hal ini menunjukkan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran sektor publik penting bagi pemerintah karena anggaran merupakan arahan pembangunan sosial ekonomi, membangun kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Anggaran banyak diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya dan pilihan. Dapat juga dipergunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran sektor publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada.

Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program – program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program – program tersebut dibiayai. Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu :

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :

- a. Tujuan dan target yang hendak dicapai.

- b. Ketersediaan sumber daya (faktor – faktor produksi yang dimiliki pemerintah).
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
- d. Faktor – faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya.

Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu :

- a. Aspek penganggaran
- b. Aspek akuntansi
- c. Aspek pengendalian
- d. Aspek auditing

Belanja

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Menurut Widiyana, 2016, belanja dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bunga
- c. Belanja subsidi
- d. Belanja hibah
- e. Belanja bantuan sosial

Efektivitas

Menurut Mahmudi (2015) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas terkait dengan hubingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Menurut Prasetyo, W. H & Nugraheni, A. P (2020:6) untuk mengetahui presentase tingkat efektivitas harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektifitas
100% Keatas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif

80% sampai 90%	Cukup Efektif
60 % sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Efisiensi

Deddi dan Ayuningtyas (2010: 161) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Menurut Abdul dan Muhammad (2019) Efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan. Menurut Prasetyo, W. H & Nugraheni, A. P (2020:6) menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan membandingkan anggaran belanja dinas dengan realisasinya.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran beianza:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60 % sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012), Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini dibatasi hanya mencakup variabel Efektivitas dan Efisiensi Belanja di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari sumutprov.go.id.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan diperoleh dari mebaca buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan variabel penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam mengolah dan menganalisis hasil penelitian, formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi anggaran belanja beserta seluruh target anggaran. Karakteristik tingkat efektivitas berdasarkan dari Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (1996) adalah :

- a. Tingkat perbandingan melebihi 100%, anggaran belanja masuk kategori sangat efektif.
- b. Tingkat perbandingan 90% - 100%, anggaran belanja masuk kategori efektif.
- c. Tingkat perbandingan 80% - 90%, anggaran belanja masuk kategori cukup efektif.

- d. Tingkat perbandingan 60% - 80%, anggaran belanja masuk kategori kurang efektif.
- e. Tingkat perbandingan dibawah 60%, anggaran belanja masuk kategori tidak efektif.

2. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan jumlah keseluruhan realisasi anggaran belanja. Karakteristik tingkat efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 adalah :

- a. Tingkat perbandingan melebihi 100%, anggaran belanja masuk kategori tidak efisien.
- b. Tingkat perbandingan 90 - 100%, anggaran belanja masuk kategori kurang efisien.
- c. Tingkat perbandingan 80 - 90%, anggaran belanja masuk kategori cukup efisien.
- d. Tingkat perbandingan 60 - 80%, anggaran belanja masuk kategori efisien.
- e. Tingkat perbandinga kurang dari 60%, anggaran belanja masuk kedalam kategori sangat efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari sumutprov.go.id dapat dilihat ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja	11.381.194.207.215,20	10.258.377.457.709,20
Belanja Operasi	9.778.812.733.865,21	8.901.819.386.760,85
Belanja Pegawai	3.814.628.029.741,68	3.529.421.296.783,00
Belanja Barang dan Jasa	2.726.845.451.823,53	2.392.354.960.877,85
Belanja Hibah	3.230.010.871.200,00	2.972.714.748.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	7.328.381.100,00	7.328.381.100,00
Belanja Modal	1.577.381.473.349,98	1.335.258.895.237,40
Belanja Modal Tanah	45.372.600.320,99	35.324.222.041,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	438.256.523.071,58	388.146.192.604,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	245.358.694.085,34	218.045.649.622,40
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	734.989.642.258,07	584.709.449.585,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.404.013.614,00	109.033.381.385,00
Belanja Tak Terduga	25.000.000.000,00	21.299.175.711,00
Belanja Tak Terduga	25.000.000.000,00	21.299.175.711,00

Berdasarkan tabel ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, dapat dilihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi memiliki anggaran sebesar 9.778.812.733.865,21 dan realisasi anggaran sebesar 8.901.819.386.760,85. Belanja modal memiliki anggaran sebesar 1.577.381.473.349,98 dan realisasi anggaran sebesar 1.335.258.895.237,40. Belanja tak terduga memiliki anggaran sebesar 25.000.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 21.299.175.711,00. Total belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 untuk anggaran sebesar 11.381.194.207.215,20 dan untuk realisasi anggaran sebesar 10.258.377.457.709,20. Berdasarkan penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran tersebut maka hasil analisis dilakukan sebagai berikut :

- a. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas anggaran belanja tahun 2019, dimana target anggaran belanja berjumlah 11.381.194.207.215,20 dengan realisasinya sebesar 10.258.377.457.709,20 Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{10.258.377.457.709,20}{11.381.194.207.215,20} \times 100\% = 90,13\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 memiliki persentase sebesar 90,13% yang menunjukkan kriteria efektif.

b. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efisiensi anggaran belanja tahun 2019, dimana realisasi anggaran belanja langsung berjumlah 7.257.035.152.898,25 dengan realisasi anggaran belanja sebesar 10.258.377.457.709,20 Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{7.257.035.152.898,25}{10.258.377.457.709,20} \times 100\% = 70,74\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 memiliki persentase sebesar 70,74% yang menunjukkan kriteria efisien.

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari sumutprov.go.id dapat dilihat ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Jenis Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja	11.494.671.486.409,30	10.935.643.264.218,00
Belanja Operasi	8.337.330.773.600,82	8.287.005.336.991,98
Belanja Pegawai	3.345.632.696.231,90	3.257.129.216.426,00
Belanja Barang dan Jasa	2.212.836.905.446,92	1.963.117.052.165,98
Belanja Hibah	2.778.861.171.922,00	3.066.759.068.400,00
Belanja Modal	1.861.148.260.522,43	1.497.944.969.133,07
Belanja Modal Tanah	197.027.482.847,00	185.356.708.726,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	681.827.430.428,00	421.144.729.678,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	258.864.794.344,77	240.314.232.826,07
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	555.428.674.416,66	538.515.511.860,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	167.999.878.486,00	112.613.786.043,00
Belanja Tak Terduga	1.296.192.452.286,00	1.150.692.958.093,00
Belanja Tak Terduga	1.296.192.452.286,00	1.150.692.958.093,00

Berdasarkan tabel ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, dapat dilihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi memiliki anggaran sebesar 8.337.330.773.600,82 dan realisasi anggaran sebesar 8.287.005.336.991,98. Belanja modal memiliki anggaran sebesar 1.861.148.260.522,43 dan realisasi anggaran sebesar 1.497.944.969.133,07. Belanja tak terduga memiliki

anggaran sebesar 1.296.192.452.286,00 dan realisasi anggaran sebesar 1.150.692.958.093,00. Total belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 untuk anggaran sebesar 11.494.671.486.409,30 dan untuk realisasi anggaran sebesar 10.258.377.457.709,20. Berdasarkan penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran tersebut maka hasil analisis dilakukan sebagai berikut :

c. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas anggaran belanja tahun 2020, dimana target anggaran belanja berjumlah 11.494.671.486.409,30 dengan realisasinya sebesar 10.935.643.264.218,00 Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{10.935.643.264.218,00}{11.494.671.486.409,30} \times 100\% = 95,14\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 memiliki persentase sebesar 95,14% yang menunjukkan kriteria efektif.

d. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efisiensi anggaran belanja tahun 2020, dimana realisasi anggaran belanja langsung berjumlah 6.718.191.237.725,05 dengan realisasi anggaran belanja sebesar 10.935.643.264.218,00 Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{6.718.191.237.725,05}{10.935.643.264.218,00} \times 100\% = 61,43\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 memiliki persentase sebesar 61,43% yang menunjukkan kriteria efisien.

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari sumutprov.go.id dapat dilihat ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Jenis Anggaran	Anggaran	Realisasi
Belanja	11.376.370.804.017,00	10.651.013.167.135,30
Belanja Operasi	10.038.653.479.703,00	9.509.003.885.719,46
Belanja Pegawai	3.497.040.891.582,00	3.372.531.926.884,00
Belanja Barang dan Jasa	3.105.254.088.787,00	2.828.790.517.550,80
Belanja Hibah	3.413.035.623.506,00	3.285.226.861.027,66
Belanja Bantuan Sosial	23.322.875.828,00	22.454.580.257,00
Belanja Modal	1.316.658.811.461,00	1.141.203.699.701,86
Belanja Modal Tanah	62.404.684.147,00	29.415.668.114,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.968.853.808,00	322.381.442.941,10
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	214.088.506.145,00	169.305.548.746,79
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	558.261.687.517,00	517.043.457.513,48
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	105.935.079.844,00	103.057.582.386,49
Belanja Tak Terduga	21.058.512.853,00	805.581.714,00

Belanja Tak Terduga	21.058.512.853,00	805.581.714,00
---------------------	-------------------	----------------

Berdasarkan tabel ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, dapat dilihat bahwa belanja terbagi menjadi tiga bagian yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi memiliki anggaran sebesar 10.038.653.479.703,00 dan realisasi anggaran sebesar 9.509.003.885.719,46. Belanja modal memiliki anggaran sebesar 1.316.658.811.461,00 dan realisasi anggaran sebesar 1.141.203.699.701,86. Belanja tak terduga memiliki anggaran sebesar 21.058.512.853,00 dan realisasi anggaran sebesar 805.581.714,00. Total belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 untuk anggaran sebesar 11.376.370.804.017,00 dan untuk realisasi anggaran sebesar 10.651.013.167.135,30. Berdasarkan penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran tersebut maka hasil analisis dilakukan sebagai berikut :

e. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efektivitas anggaran belanja tahun 2021, dimana target anggaran belanja berjumlah 11.376.370.804.017,00 dengan realisasinya sebesar 10.651.013.167.135,30 Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{10.651.013.167.135,30}{11.376.370.804.017,00} \times 100\% = 93,62\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 memiliki persentase sebesar 93,62% yang menunjukkan kriteria efektif.

f. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan Rasio Efisiensi anggaran belanja tahun 2021, dimana realisasi anggaran belanja langsung berjumlah 7.342.526.144.136,66 dengan realisasi anggaran belanja sebesar 10.651.013.167.135,30 Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja Tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{7.342.526.144.136,66}{10.651.013.167.135,30} \times 100\% = 68,94\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 memiliki persentase sebesar 68,94% yang menunjukkan kriteria efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019-2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efektivitas anggaran belanja dinilai efektif hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitas anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar 90,13%, tahun 2020 sebesar 95,14% dan tahun 2021 sebesar 93,62%. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kriteria efektif.
2. Pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019-2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efisiensi anggaran belanja dinilai efisien hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar 70,74%, tahun 2020 sebesar 61,43% dan tahun 2021 sebesar 68,94%. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kriteria efisien.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menilai dari segi efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat mempertahankan tingkat efektivitas yang setiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat baik dari kriteria efektif dapat menjadi kriteria sangat efektif.
2. Menilai dari segi efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat mempertahankan tingkat efisiensi yang setiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat baik dari kriteria efisien dapat menjadi kriteria sangat efisien.

REFERENSI

- Abdul, H., Muhammad, S. K. 2019. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Andriani, P. N., & Setyowati, E. (2016). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2(1), 58–67.
- Deddi dan Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). Efektivitas. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta.
- Majid. Jamaludin. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Sulawesi Selatan: Penerbit Pusaka Almada.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi keempat, Yogyakarta: CV Andi.
- Prasetyo, W Heri. 2020. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang Periode 2015 –2019. Jurnal. Vol : 11 No : 1 Tahun 2020 e-ISSN: 2614 –1930. Universitas Tidar Magelang Jawa Tengah.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya, 1, 0–216
- Roudlotul Jannah. (2013). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumnege S. Aries, (2013). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA. 1(3). 74-81.
- Widiyana, A. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Yunina, F. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 9(1), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>